

ESAI NARASI

Topik: Sejarah Internasional

GAMBARAN SINGKAT SEJARAH KONFLIK KEPEMILIKAN PULAU DOKDO ATAU TAKESHIMA

oleh: Rostamaji Korniwawan

Akhir perang dunia kedua membuat Jepang menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada negara yang memiliki otoritas penuh atas wilayah yang pernah diokupasi oleh Jepang pada masa itu. Korea Selatan adalah salah satunya. Penyerahan wilayah jajahan Jepang kepada Korea Selatan setelah perang berakhir menyisakan satu masalah yang belum selesai sampai saat ini. Masalah ini bahkan menjadi konflik yang berkesinambungan, yang belum menemukan titik kulminasi penyelesaiannya. Konflik ini merupakan pengakuan kedaulatan suatu pulau yang bernama Pulau Takeshima (Dokdo). Bagi Korea Selatan, pulau ini mereka akui dengan sebutan Pulau Dokdo (독도). Sedangkan bagi Jepang, pulau ini mereka akui dengan sebutan Pulau Takeshima (竹島, たけしま). Sebuah pulau yang tak berpenghuni, tetapi memiliki makna sejarah dan perjalanan panjang perjuangan perdamaian di kawasan Asia Pasifik atau khususnya di kawasan Asia Timur Laut.

Catatan sejarah yang disampaikan oleh Professor Alexis Dudden pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh The Korea Society pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kedudukan Pulau Takeshima (Dokdo) mulai beralih dari kekuasaan Jepang kepada Korea Selatan ketika perang Semenanjung Korea berakhir. Kepentingan Amerika Serikat terhadap penyelesaian konflik Jepang dan Korea Selatan juga menjadi dasar di dalam perkembangan konflik pulau tersebut. Korea Selatan mengambil alih Pulau Takeshima (Dokdo) di abad ke-20 dengan dasar dokumen perjanjian San Fransisco yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Namun, sejarah juga mencatat bahwa Pulau Takeshima (Dokdo) yang diakui oleh Pemerintah Korea Selatan juga memiliki ikatan sejarah dengan warga Jepang pada masa lalu.

Sejarah kepemilikan Pulau dengan dua nama versi yang diakui Korea Selatan dan Jepang ini memiliki makna tersendiri bagi Korea Selatan dan Jepang. Satu catatan penting yang harus diketahui semua pihak bahwa hubungan Jepang dengan Korea Selatan memiliki sejarah yang sangat kelam. Jepang menduduki Korea Selatan selama masa perang dunia kedua. Namun sejarah juga mencatat bahwa Jepang juga sudah melakukan invasi terhadap Korea Selatan di tahun 1592-1596. Yaitu invasi pada periode Buronku. Pada masa itu, Pulau Takeshima (Dokdo) menjadi pulau yang dimanfaatkan oleh sebagian penduduk Jepang yang ada di Pulau Oki. Pada masa itu pula, Pulau Takeshima (Dokdo) awalnya bernama Pulau Utsuryo. Bagi sebagian penduduk di Jepang, pulau tersebut dimanfaatkan untuk menangkap singa laut yang mereka jadikan sebagai komoditas hewani yang

diperdagangkan di wilayah kepulauan Jepang. Sebelum penduduk Jepang menggunakan Pulau Utsuryo, penduduk Korea Selatan juga menggunakan pulau tersebut sebagai pulau pengungsian akibat peralihan kekuasaan Dinasti Korea Selatan.

Arata Yokokawa (Japan Digital Library, 2015) menceritakan dokumentasi sejarah peralihan Dinasti Korea Selatan tersebut. Sejarah mencatat kekuasaan Dinasti Goryeo beralih ke Dinasti Joseon di tahun 1392. Pada masa pemerintahan Dinasti Joseon, Raja Taejong (1401-1418) dan Raja Sejong (1418-1450) mengeluarkan satu kebijakan terkait lokasi pengungsi yang hijrah ke Pulau Utsuryo. Kebijakan para raja Dinasti Joseon tersebut dikenal dengan sebutan "*evacuated island policy*." Kebijakan ini esensinya mendorong para pengungsi agar segera kembali ke daratan Korea. Kebijakan ini bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati para pengungsi. Apabila mereka mengabaikan perintah ini, para pengungsi tersebut akan ditarik secara paksa untuk kembali ke daratan Korea. Menurut Yokokawa, kebijakan ini masih berlaku hingga tahun 1881.

Pulau Utsuryo merupakan nama lain dari Pulau Dokdo atau Takeshima yang diperebutkan Korea Selatan dan Jepang sampai saat ini (pertengahan tahun 2021). Siapa yang berhak memiliki pulau tersebut masih menjadi bahan perdebatan kedua belah pihak. Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang dan Korea Selatan juga mendukung keduanya di dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka, bijak, dan hati-hati. Amerika Serikat juga mengingatkan kedua belah pihak untuk memikirkan kepentingan yang lebih esensial, terutama kepentingan ekonomi dan keamanan yang sudah lama terbentuk di kawasan Asia Pasifik. Kepentingan tersebut mengingatkan semua pihak bahwa interdependensi ekonomi antara Jepang dengan Korea Selatan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kepentingan ekonomi antara Jepang dengan Amerika Serikat ataupun hubungan kerja sama Korea Selatan dengan Amerika Serikat juga berjalan dengan baik. Namun, kata penting dari penyelesaian konflik ini adalah kedaulatan. Karena kedaulatan merupakan harga mutlak yang harus dipertahankan keduanya, seperti halnya pertahanan kedaulatan Korea Selatan terhadap Batu Socotra (lōdo), yang merupakan wilayah terumbu karang Korea Selatan yang diinvasi oleh nelayan dari Cina.

Dokumen sejarah dari berbagai sumber memang bisa menjadi jalan pembuka penyelesaian konflik. Namun, dokumen sejarah juga seringkali diungkapkan dengan sudut pandang yang berbeda. Baik itu dokumen yang bersumber dari catatan sejarah Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, maupun dari sumber lainnya. Yokokawa menemukan keragaman sudut pandang tersebut. Salah satunya adalah catatan sejarah yang ditemukan masa kepemimpinan Kekaisaran Edo atau Tokugawa (1603-1867). Yokokawa menyebutkan bahwa Jepang pada akhirnya menyebut Pulau Utsuryo sebagai Pulau Takeshima (Dokdo).

Pulau Takeshima (Dokdo) memiliki jarak yang lebih dekat dengan daratan Korea Selatan. Sedangkan Jepang memiliki pulau terdekat bernama Pulau Matshusima. Posisi Pulau Takeshima (Dokdo) berada diantara Pulau Oki dengan Pulau Ulleungdo. Pulau Oki sendiri merupakan pulau berpenghuni yang merupakan bagian dari teritori pemerintahan Jepang. Sedangkan Pulau Ulleungdo merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Korea Selatan. Jarak antara Pulau Takeshima (Dokdo) dengan Pulau Oki adalah sepanjang 157,5 km. Sementara itu jarak Pulau Takeshima (Dokdo) dengan Pulau Ulleungdo adalah 87,4 km. Apabila Pulau Takeshima (Dokdo) diukur dari batas garis pantai Jukbyeon Korea Selatan, jaraknya mencapai 216,8 km. Kemudian apabila jarak antara Pulau Ulleungdo dengan Pulau Takeshima (Dokdo) menjadi tolok ukur penyelesaian sengketa, hal ini menjadi bukti kuat bagi Pemerintah Korea Selatan bahwa Korea Selatan memiliki hak kedaulatan atas Pulau Takeshima (Dokdo). Namun apabila jarak Pulau Takeshima (Dokdo) diukur dari garis pantai Jukbyeon, kepemilikan pulau ini tentu menjadi hak bagi Pemerintah Jepang karena jarak antara Pulau Oki ke Pulau Takeshima (Dokdo) menjadi pertimbangannya. Namun kondisi geografi ini masih belum bisa menjadi jaminan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara mudah.

Gambar 1. Lokasi Pulau Takeshima (Dokdo)



Sumber: <http://www.k-dokdo.com>

Selain catatan sejarah yang ditemukan di masa kekaisaran Edo, ada lagi catatan sejarah yang dikemukakan oleh orang-orang dari wilayah Eropa. Tahun 1787, Kolonel Jean François de Galaup dari Perancis melakukan survei terhadap Pulau Takeshima (Dokdo). Dia kemudian menamakan pulau ini dengan sebutan "Dagelet." Pada tahun 1797, Letnan Kolonel William R. Broughton dari Inggris juga melakukan hal yang sama. Namun, dia menyebut pulau ini dengan sebutan "Argonaute." Pada abad ke-17, tepatnya di tahun 1840, Philipp Franz Balthasar von Siebold berkebangsaan Jerman menggambarkan peta wilayah Jepang dengan memposisikan Pulau Takeshima (Dokdo) dengan sebutan yang salah. Misinformasi yang dia sampaikan memposisikan "Argonaute" sebagai Pulau Takeshima dan "Dagelet" yang letaknya berdekatan dengan Jepang disebut sebagai Pulau Matsushima. Dokumentasi sejarah Pulau Takeshima (Dokdo) ini tentu memberikan informasi yang membingungkan.

Tidak hanya Philipp Franz Balthasar von Siebold, armada kapal dari Rusia, Pallada, juga menyampaikan misinformasi terkait posisi dan penyebutan Pulau Takeshima (Dokdo). Dan baru di tahun 1880, Kapal Perang Amagi dari Jepang memberikan gambaran yang tepat mengenai eksistensi Pulau Utsuryo pada masa itu. Pulau Utsuryo kemudian diakui sebagai Pulau Takeshima (Dokdo) secara resmi oleh pemerintahan Kekaisaran Meiji (1852-1912) di tahun 1905. Pengakuan Jepang terhadap Pulau Takeshima (Dokdo) juga didasari oleh permintaan seorang nelayan yang bernama Yozaburo Nakai di tahun 1904. Permintaan Yozaburo Nakai didasari pada keprihatinannya terhadap perburuan singa laut oleh nelayan Jepang yang berasal dari Pulau Okinoshima. Perburuan singa laut sudah dilakukan penduduk Okinoshima sejak tahun 1897. Kondisi ini tentu menyebabkan kepunahan populasi singa laut di sekitar Pulau Takeshima (Dokdo). Oleh karena itu, Yozaburo Nakai meminta Pemerintah Jepang untuk memasukan Pulau Takeshima (Dokdo) sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Jepang. Pengakuan Pemerintah Jepang terhadap Pulau Takeshima (Dokdo) yang berlaku sejak tahun 1904 tidak berlangsung lama, karena Korea Selatan juga mengakui pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Setelah perang dunia kedua berakhir, sengketa kepemilikan Pulau Takeshima (Dokdo) antara Korea Selatan dan Jepang mulai timbul diantara keduanya.

Perjalanan panjang pengakuan ganda kepemilikan Pulau Takeshima (Dokdo) ini memang sangat menyita waktu dan tenaga. Namun, semangat kedua negara untuk mengakui pulau tersebut perlu diapresiasi karena mereka sama-sama bertujuan menjaga wilayah kedaulatan mereka masing-masing berdasarkan argumentasi yang mereka ajukan. Namun, mereka harus menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin agar sejarah perang dunia yang pernah terjadi tidak terulang kembali meskipun konflik fisik diantara keduanya seringkali timbul dan tenggelam. Jalan yang terbaik bagi masalah ini adalah menyampaikan legitimasi dokumentasi sejarah yang diakui kedua belah pihak maupun internasional. Namun jika hal ini sulit untuk diwujudkan, kedua belah pihak bisa memanfaatkan pulau tersebut untuk kepentingan bersama. Sepanjang tidak ada sumber nilai tambah yang menjadi kontroversi yang diperebutkan secara signifikan, pulau tersebut bisa dimanfaatkan di dalam menjaga stabilitas geopolitik dan geoekonomi di kawasan Asia Timur Laut. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap pada hasil akhir dari kesepakatan kedua negara apabila mereka telah menemukan jalan tengah di dalam menyelesaikan persoalan ini. Semua negara di kawasan Asia Pasifik tentu akan mendukung langkah yang tepat yang diambil kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chung, C-P & Park, J.B. (2017). Sub-and Trans-National Actors in South Korea's Island Disputes: The Cases of Dokdo and Iōdo. *Asian Affairs: An American Review*, 44(1), 9-29.
- Japan Digital Library (2015). Rule of Law Series https://www2.jiia.or.jp/en/digital_library/rule_of.php. Diakses tanggal 20 Juli 2021.
- Roehrig, T. (2017). Stuck Between Two Allies. *The Korean Journal of International and Comparative Law*, 5(2), 216-237.
- Schrijver, N.J. & Prislán, V. (2015). Cases Concerning Sovereignty over Islands before the International Court of Justice and the Dokdo/Takeshima Issue. *Ocean Development & International Law*, 46(4), 281-314.